

MASYARAKAT MUSLIM DAN PENDIDIKAN TINGGI DI INDONESIA (Tantangan Dalam Merintis Paradigma Baru)

Saiful Akhyar Lubis

Abstrak

Indonesia dengan dasar negara pancasila berpenduduk mayoritas muslim, tak urung dihadapkan kepada masalah pendidikan tinggi, terutama dalam kaitannya dengan pembangunan. Dalam hal ini, masyarakat muslim Indonesia menyadari betapa seyogyanya reformasi tidak seharusnya lagi hanya dilakukan secara *ad hoc* dan parsial, tetapi harus bersifat komprehensif, baik pada tataran konsep maupun penyelenggaraannya; bukan lagi *ad hoc* dan *incremental* seperti pada masa silam. Yang terpenting perlu dikembangkan kebijaksanaan makro dan mikro yang menekankan penyiapan anak bangsa dengan seperangkat kemampuan, kecakapan dan motivasi dalam aktualisasi dan institusionalisasi masyarakat madani Indonesia. Karakteristiknya, masyarakat belajar yang tumbuh dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat yang menempatkan pendidikan sebagai proses sepanjang hayat (*min al-mahdi ila al-lahd* atau *long life education*) dan menjadikan *nation and character building* inti dan salah satu tujuan pokoknya.

Kata Kunci : masyarakat muslim, pendidikan tinggi, paradigma baru

Pendahuluan

Pendidikan akan senantiasa dilihat dalam kaitannya dengan masyarakat dan negara, dengan pengertian, pendidikan tidak hanya dipandang sebagai upaya atau bantuan untuk mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki peserta didik agar menjadi nyata, melainkan ditinjau pula tentang kaitannya antara individu dengan masyarakat dan negara.

Pendidikan Dalam Masyarakat Muslim Indonesia

Sikap Islam mengenai pentingnya pendidikan dalam kehidupan manusia sangat jelas. Islam mengakui bahwa belajar dan menuntut ilmu adalah hak asasi setiap manusia. Demokrasi pendidikan yang ditumbuhkan oleh Islam merupakan

revolusi terbesar dalam sejarah umat manusia. Eksperimen, teori, observasi, deduksi, dan sistemasi sebagai unsur-unsur dalam metode ilmiah didorong amat kuat oleh al-Qur-'an. (lihat al-Baqarah : 164).

Masyarakat Islam dan masyarakat Barat tidak berbeda pandangan dalam memahami pendidikan sebagai pengalihan pengalaman dari suatu generasi ke generasi berikutnya.¹ Pada dasarnya pengalihan pengalaman tersebut bagi seorang muslim dapat dibagi menjadi dua kategori. **Pertama**, pengalaman dalam bentuk ilmu, pengetahuan teknis atau teknologi, dan keterampilan-keterampilan yang sifatnya senantiasa berubah dari abad ke abad. **Kedua**, pengalaman yang didasarkan pada nilai etik permanen yang termaktub dalam al-Qur'an dan Sunnah yang mengandung kebenaran abadi dan tidak berubah. Justru itu, dipandang bahwa iman dan pengetahuan tidak dapat dipisahkan. Iman tanpa pengetahuan tidak bisa membawa manusia kepada kehidupan yang cerah, sedangkan pengetahuan tanpa iman akan menjerumuskan manusia ke suatu kebodohan baru. Dalam persepsi muslim, agama dan pengetahuan atau sains harus saling melengkapi.

Namun, hampir di semua negeri muslim (termasuk Indonesia) terlihat adanya dua sistem pendidikan, yakni sistem pendidikan agama dan sistem pendidikan sekular. Untuk pendidikan agama, yang menjadi bentengnya adalah pesantren. Pesantren selalu diasosiasikan dengan organisasi Nahdatul Ulama, yang didirikan oleh ulama Jawa Timur pada tahun 1926.² Pada sisi lain, Muhammadiyah yang didirikan pada tahun 1912,³ memusatkan kegiatan pendidikannya pada sekolah-sekolah sekular, dari tingkat taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Pemberian porsi pelajaran agama yang lebih besar membedakannya dengan sekolah-sekolah pemerintah, Muhammadiyah berupaya menanggulangi kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam sistem pesantren dengan meniru sebagian besar kandungan sistem pendidikan Eropa.

Muhammadiyah ingin menghasilkan apa yang disebut "intelektual kyai" atau "kyai intelektual".

Organisasi-organisasi lain yang juga berkecimpung dalam kegiatan pendidikan adalah: al-Jam'iyatul Washliyah, Persatuan Umat Islam (PUI), Persatuan Islam (Persis), Darul Dakwah wal Irsyad (DDI), al-Islam, Matla'ul Anwar, al-Rabitah dan lain-lain, tetapi jumlah sekolah mereka jauh lebih kecil.

Khususnya lembaga pendidikan al-Jam'iyatul Washliyah, telah mulai berdiri sejak tahun 1918, - (sebelum resmi menjadi organisasi al-Jam'iyatul Washliyah pada tahun 1930) – ketika itu didirikan Maktab Islamiyah Tapanuli (MIT), dikenal sebagai lembaga pendidikan Islam formal pertama di Medan. Kegiatan pendidikannya mencoba menggabungkan sistem tradisional dan modern. Dari segi isi, apa yang diajarkan di MIT tidak jauh berbeda dari pesantren-pesantren tradisional, tetapi pengajaran sudah dilakukan secara klasikal dengan menggunakan media-media moderen seperti bangku, papan tulis dan sebagainya. Pendidikan di maktab ini sudah di bagi ke dalam tiga tingkatan: persiapan (*tajhîzî*), awal (*ibtidâ'î*), dan menengah (*tsanawî*). Lembaga pendidikan Islam ini berkembang cukup baik, dan pada tahun 1930-an MIT telah mempunyai sekitar 1.000 orang siswa dari berbagai daerah sekitar Medan.⁴

Di luar itu, tidak sedikit umat muslim yang berkiprah di berbagai perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Justru itu, persepsi masyarakat muslim Indonesia terbagi pada tiga orientasi, yakni:

- a. Yang yakin bahwa sistem pendidikan pesantren paling ideal dan jalan yang paling tepat untuk memperoleh keridaan Allah.
- b. Yang lebih menyukai sekolah Muhammadiyah, karena mencakup pelajaran sekolah negeri dan pelajaran agama.
- c. Yang lebih memilih sekolah negeri, karena biayanya murah, kualitasnya lebih baik dan lebih memberikan harapan bagi alumnusnya untuk memperoleh pekerjaan secara lebih mudah.

Kondisi Pendidikan Tinggi Pasca Kemerdekaan

Ada beberapa masalah yang dihadapi oleh pendidikan tinggi di Indonesia, antara lain :

Pertama, pesatnya pertumbuhan perguruan tinggi yang ada (baik negeri maupun swasta). Menurut catatan LIPI, pada tahun 1950 jumlah mahasiswa hanya sekitar 1.000 orang.⁵ Pada tahun 1978/1979 meningkat menjadi 385.000 orang, dan pada tahun 1983/1984 jumlah total mahasiswa di universitas negeri dan swasta sebesar 805.000 orang.⁶ Tentu pada tahun-tahun terakhir ini telah pula meningkat beberapa kali lipat. Meningkatnya jumlah tersebut adalah refleksi ledakan penduduk sejak tahun 1950-an, dan sulitnya lulusan sekolah menengah memperoleh pekerjaan. Pada gilirannya menciptakan masalah yang sulit diatasi terutama kaitannya dengan kualitas outputnya.

Kedua, rendahnya produktivitas. Dari separuh lulusan sekolah menengah yang dapat berstudi di perguruan tinggi, hanya sekitar 20% yang berhasil lulus. Meskipun data tentang dropout sukar diperoleh, tetapi dapat diasumsikan bahwa tingkat drop-out sangat tinggi. Menurut sumber terpercaya, dari 250.000 mahasiswa di perguruan tinggi negeri, diduga hanya 40.000 orang yang berhasil lulus,⁷ di antara mereka yang mengikuti suatu program studi hanya seperlima yang mencapai sarjana, jadi tiap 10 mahasiswa ada 8 orang yang drop-out.⁸ Penyebab drop-out pada umumnya adalah besarnya biaya pendidikan, hanya golongan menengah ke atas yang dapat menikmatinya, bagi masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan, tentunya tak mungkin terjangkau. Hal ini menyebabkan tingginya tingkat pengangguran berpendidikan, dan berbahaya jika mereka mengalami proses radikalisisasi akibat kekecewaan,

Ketiga, berkaitan dengan kualitas dosen dan mahasiswa. Hal ini menyangkut masalah kemampuan berbahasa asing (terutama Inggris dan Arab) yang masih rendah, efektivitas metode pengajaran dosen yang belum tercapai dengan baik, dan kebiasaan membaca yang belum

menjadi sikap pribadi mahasiswa, sehingga pemikiran inisiatif dan kreatif mahasiswa tidak terangsang, dan sang dosen dianggap "selalu benar".

Pada sisi lain, kondisi perguruan tinggi swasta kelihatan lebih buruk dibanding perguruan tinggi negeri. Masalah yang mereka hadapi terutama adalah masalah keuangan, Mereka harus berdiri di atas kaki sendiri, justru itu sumber keuangan mereka yang terbesar adalah dari mahasiswa, bahkan ada yang sepenuhnya mengandalkan mahasiswa. sebagai satu-satunya sumber keuangan. Hal ini menyebabkan mahasiswa yang drop-out dari perguruan tinggi swasta merasakan trauma yang lebih parah dibanding mereka yang drop-out dari perguruan tinggi negeri, karena besarnya biaya yang telah mereka keluarkan. Di samping itu, pengawasan KOPERTIS/KOPERTAIS yang kelewat ketat sampai hal-hal yang kecil menyebabkan mereka kehilangan kemandiriannya dan terpaksa menyesuaikan diri dengan kriteria yang telah ditetapkan dengan mentaati syarat-syarat formal dan tertulis, tanpa memberikan perhatian yang memadai terhadap masalah kualitas.

Masalah penting lainnya adalah sikap apatis mahasiswa, sebagai dampak dibubarkannya Dewan Mahasiswa pada tahun 1978 dan diserukannya mahasiswa "kembali ke kampus". Peraturan ini mengakibatkan mahasiswa menjadi lumpuh secara politik, dan bersikap apatis serta acuh tak acuh terhadap problem-problem masyarakat. Di samping itu, pengarah dan kontrol politik pemerintah yang ketat mengakibatkan perguruan tinggi tidak lagi memiliki kebebasan untuk berkembang secara independen dari kepentingan pragmatis serta kepentingan politik sesaat.

Khusus masalah pendidikan tinggi Islam (meminjam istilah Husain dan Ashraf, 1979), pada umumnya pendidikan Islam terjepit dalam konflik antara tradisi dan modernitas. Dalam hal ini, terlihat adanya dua sistem pendidikan yang dominan : (a) pendidikan tradisional yang membatasi diri pada ilmu-ilmu klasik Islam, tanpa minat serius mengadopsi/mengembangkan metode baru untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Dampaknya, sistem ini tidak memiliki alat memadai untuk menjawab tantangan modernitas, baik secara substansi maupun

metodologi; (b) sistem pendidikan yang pada dasarnya dipinjam dari Barat, pada puncaknya lahir perguruan tinggi yang secara total atau sebagiannya sekular. Dampaknya, alumninya cenderung terserabut dari warisan keagamaan dan intelektual Islam.

Dikotomi kedua sistem pendidikan dimaksud memperbesar dikotomi keilmuan antara "ilmu-ilmu agama" dengan "ilmu-ilmu umum". Pada gilirannya ada upaya untuk membangun "sistem ketiga", bertujuan untuk "mereintegrasi" keduanya. Setidaknya telah berkembang tiga model. **Model pertama**, kedua sistem dan substansi keilmuan ditempatkan di bawah satu atap. "Ilmu-ilmu umum" dilembagakan pada fakultas-fakultas umum dan "ilmu-ilmu agama" pada satu fakultas agama (contoh : UII Yogyakarta, UNISBA Bandung). Ternyata masih juga terjadi dikotomi antar fakultas, bahkan ada kecenderungan fakultas agama menjadi marjinal yang diminati oleh mahasiswa dalam jumlah minim. **Model kedua**, dilandasi konsep gagasan tentang "Islamisasi ilmu pengetahuan" (Ismail al-Faruqi dan Naquib Alatas), bahwa ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum bersatu dalam satu ranah (*integrated domain*). Model ini menawarkan kelembagaan keilmuan menjadi : fakultas ilmu-ilmu wahyu (*faculties of revealed knowledge*) dan fakultas ilmu-ilmu non-wahyu (*faculties of non-revealed knowledge*). Ternyata gagasan ini masih mengandung sejumlah masalah dan pertanyaan antara lain: menyangkut epistemologi ilmu sebagai satu kesatuan, batas-batas "islamisasi ilmu" tersebut, bidang-bidang ilmu yang akan "diislamisasikan". **Model ketiga**, menempatkan "ilmu-ilmu agama" menjadi titik tolak yang merupakan inti seluruh wacana serta proses keilmuan dan akademis, "ilmu-ilmu umum" menjadi suplemen dan pelengkap yang terintegrasi sepenuhnya dalam kurikulum dan menjadi ilmu bantu untuk memahami/menjelaskan kerangka normatif agama (contoh: IAIN dan STAIN). Ternyata IAIN dan STAIN dipandang dan diperlakukan sebagai perguruan tinggi "murni agama", dan alumninya dikategorikan sebagai "sarjana agama" padahal

mereka memiliki keterampilan profesional bukan pada bidang agama saja, tetapi juga bidang umum (seperti Bahasa Inggris, Matematika, IPA dan lain-lain).

Pengembangan Pendidikan Tinggi di Era Pembangunan Nasional

Pengembangan pendidikan tinggi dalam era pembangunan nasional beranjak dari permasalahan yang dihadapi oleh pendidikan tinggi itu sendiri. yakni:

- a. Ledakan jumlah mahasiswa yang menuntut perluasan kesempatan pendidikan.
- b. Perbaikan kualitas pengajaran.
- c. Upaya pembaharuan kurikulum yang relevan dengan masalah-masalah pembangunan nasional.

Karena mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, maka beralasanlah jika dikatakan bahwa masalah-masalah yang dihadapi oleh pendidikan tinggi di Indonesia merupakan masalah masyarakat muslim Indonesia.⁹ Tidak pula dapat disangkal karena peranan organisasi-organisasi Islam berdirilah berbagai perguruan tinggi swasta, antara lain: Universitas Muhammadiyah di Solo, Jakarta dan Yogyakarta, Universitas Ibn Khaldun di Jakarta dan Bogor, Universitas Islam Bandung (UNISBA) di Bandung, Universitas Islam Indonesia (UII) di Yogyakarta, Universitas Islam Sultan Agung (UNISULA) di Semarang, Universitas Islam Bogor (UIB) di Bogor, Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) di Medan, Universitas Alwashliyah (UNIVA) di Medan, Universitas Muslimin Indonesia (UMI) di Makasar.¹⁰ Namun, karena suatu perguruan tinggi swasta hanya akan diakui jika kurikulumnya sama persis dengan kurikulum perguruan tinggi negeri (meskipun pemberian mata kuliah tambahan dibolehkan), pada dasarnya toleransi ini tidak dapat mengubah kenyataan yang menggambarkan bahwa universitas swasta hanya merupakan duplikat universitas negeri.

Dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara yang menjadi landasan pelaksanaan Pelita, secara eksplisit dan implisit dinyatakan bahwa, pendidikan tinggi harus dikembangkan untuk kepentingan perekonomian modern, dengan berlandaskan trilogi pembangunan dan delapan jalur pemerataan. Analisa Soedjatmoko menunjukkan bahwa perluasan pendidikan tinggi yang pesat pada tahun 1960-an, 1970-an, dan terutama pada pertengahan tahun 1980-an, ternyata telah menghasilkan *man power* secara jauh lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan perekonomian Indonesia untuk menyerapnya, sehingga terjadilah ledakan pengangguran berpendidikan.¹¹ Ketika itu para lulusan sekolah menengah yang tidak memperoleh pekerjaan memandang bahwa jalan untuk mendapatkan pekerjaan pada sektor perekonomian modern adalah dengan melanjutkan studi di perguruan tinggi. Namun, setelah lulus ternyata yang mereka idamkan tidak sesuai dengan kenyataan, seandainya pun ada lowongan, imbalan yang akan mereka terima tidak memadai.

Harus diakui bahwa masalah pengangguran di Indonesia bukan merupakan tanggung jawab sektor pendidikan sepenuhnya dan secara langsung. Penanggulangannya dapat diupayakan dengan mengalihkan sumber-sumber dana pemerintah yang selama ini dialokasikan ke sektor-sektor pendidikan yang tidak produktif kepada pembiayaan proyek-proyek penciptaan lapangan kerja yang lebih produktif, khususnya proyek-proyek yang padat tenaga kerja. Dengan demikian, tentunya penggunaan dana-dana tersebut dapat lebih efisien dan lebih bermanfaat.

Sistem pendidikan di Indonesia dewasa ini bertolak dari ideologi pembangunan yang berlaku di dunia ketiga tahun 1970-an, yang meyakini bahwa sektor modern akan berperan me-ntukan dalam proses pembangunan, dan keuntungan yang dipetik dari pembangunan semacam itu akan menetes ke sektor tradisional. Justru itu, yang diperlukan saat ini adalah menciptakan ideologi dan strategi pembangunan yang baru. Hal ini pada dasarnya akan memerlukan

pemusatan sumber daya pembangunan secara besar-besaran, demi memperbaiki kondisi hidup mereka yang berada di sektor tradisional. Aspek lain dari strategi pembangunan yang baru ini adalah pemberian perhatian yang bukan hanya terhadap "pembangunan sumber daya manusia", tetapi juga terhadap "pemanfaatan sumber daya manusia".

Ternyata bahwa untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam transisi era pasar bebas semakin mendesak. Pada tahun 1993 Presiden Suharto (ketika itu) bersama beberapa kepala negara di Seattle Amerika Serikat bersepakat untuk : (a) mencari penyelesaian berbagai masalah dan tantangan pembangunan ekonomi regional dan global, (b) meningkatkan kerjasama ekonomi melalui sistem perdagangan multilateral, (c) memperkecil kendala dalam menjalin kerjasama perdagangan dan investasi agar barang, jasa dan modal dapat berjalan secara bebas di kawasan Asia dan Pasifik, (d) meyakinkan setiap warga negara akan memperoleh keuntungan dan pertumbuhan ekonomi, peningkatan mutu pendidikan dan pelatihan, kerjasama ekonomi melalui sarana telekomunikasi dan transportasi, serta pendayagunaan sumber daya yang ada secara berkesinambungan.

Tekanan global terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia dimaksud memiliki intensitas yang jauh lebih tinggi ketika era transisi memasuki abad ke-21 pada saat pasar bebas dinyatakan wujud pada tahun 2003 di kawasan ASEAN dan akan wujud pada tahun 2020 di kawasan Asia dan Pasifik.¹² Tanpa langkah inovatif dan strategis dalam memacu peningkatan sumber daya manusia, dikhawatirkan Indonesia akan menjadi korban dalam era percaturan global tersebut.

Jutsru itu, reformasi pendidikan secara menyeluruh (termasuk pendidikan Islam) di semua jenjang (tidak terkecuali perguruan tinggi) perlu dilakukan. Paling tidak ada dua alasan utama: (a) masyarakat muslim memerlukan layanan pendidikan berkualitas berkarakteristik Islam di semua jenjang; demi menumbuhkan nilai-nilai keislaman secara akademik, kritis dan rasional sesuai

dengan pola al-Qur`an dan Sunnah, berpandangan luas, sigap serta tanggap terhadap perkembangan ilmu dan teknologi, sehingga keimanan dan ketakwaan mereka terinternalisasi dalam seluruh aspek kehidupan, (b) adanya kesadaran masyarakat tentang pentingnya integrasi pendidikan agama dan pendidikan umum (landasannya diletakkan dan dikukuhkan dalam Undang-undang nomor 2 tahun 1989 dan nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional). Berdasarkan data statistik Departemen Agama terlihat peningkatan angka partisipasi siswa Madrasah Tsanawiyah sekitar 8% sebelum tahun 2000 dan sekitar 10-11% sesudah tahun 2000. Kecenderungan ini kelihatan juga pada jenjang yang lebih tinggi yakni Madrasah Aliyah dan perguruan tinggi (IAIN dan STAIN).

Pendidikan Tinggi di Era Reformasi: Merintis Paradigma Baru

Tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan tinggi di Indonesia merupakan warisan zaman kolonial yang kemudian dimodifikasi di bawah pengaruh sistem Amerika dan Eropa, yang ternyata mengabaikan masalah-masalah riil yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia, terutama masyarakat muslim. Justru itu, kemiskinan dan pengangguran merupakan masalah kembar yang tidak bisa ditanggulangi dengan pendidikan tinggi yang hanya berorientasi Barat, yang dirancang untuk memenuhi keperluan sektor perekonomian modern.

Dengan demikian, diperlukan adanya perubahan strategi dan sistem pendidikan, termasuk juga kurikulumnya. Untuk itu, upaya yang dilakukan harus didasarkan kepada tradisi agama dan tradisi kultural yang dipelihara dan ditafsirkan kembali secara kreatif. Kembali ke tradisi agama berarti melakukan seleksi progresif dan membuat interpretasi baru. Harus disadari bahwa hal ini merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh masyarakat muslim Indonesia. Yang jelas, pembaharuan dan pengembangan pendidikan tinggi sangat bergantung pada cara-cara menghadapi tantangan-tantangan tersebut di atas.

Justru itu, konsep "paradigma baru" merupakan sebuah keharusan untuk dimiliki dan dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta (termasuk IAIN/UiN dan STAIN). Dalam hal ini, disepakati analisa Azra yang memandang relevan melandaskannya pada prinsip "*World Declaration on Higher Education for the Twenty-First Century : Vision and Action, UNESCO, 1998*" yang dideklarasikan pada "*World Conference on Higher Education*" (Paris, 5-9 Oktober 1998). Dalam deklarasi dimaksud perguruan tinggi berikut segenap civitas akademiknya harus mampu menjaga dan mengembangkan fungsi krusial mereka dengan pelaksanaan etika serta kelugasan ilmiah dan akademis dalam berbagai kegiatan; mampu berbicara lantang tentang masalah etika, budaya dan sosial secara independen; sadar dan bertanggungjawab melaksanakan kapasitas intelektual serta prestise moral; aktif menyebarkan nilai-nilai perdamaian, keadilan, kebebasan, kesetaraan, solidaritas yang telah diterima secara universal. Dalam praktiknya perguruan tinggi dituntut mengembangkan secara simultan lima bentuk kecerdasan : kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan praktikal, kecerdasan sosial, serta kecerdasan spritual dan moral. Berikut merealisasi bahwa pendidikan harus berpusat pada peserta didik/mahasiswa (*student centered education*).¹³

Paradigma baru dimaksud dijadikan kerangka dan landasan pengembangan perguruan tinggi yang bersangkutan dalam merumuskan program pokok : (a) peningkatan kualitas yang berkesinambungan melalui peningkatan kualitas manajemen yang diperbaiki, di mana otonomi, akuntabilitas dan akreditasi menjadi komponen terpenting; (b) peningkatan produktivitas; (c) peningkatan relevansi; (d) peningkatan kesempatan memperoleh pendidikan; (e) peningkatan pelayanan kepada masyarakat; (f) peningkatan bidang keilmuan eksakta atau iptek; (g) peningkatan kemampuan berkembang.

Paradigma ini bertujuan memberikan panduan bagi pengembangan mekanisme guna memperkuat perguruan tinggi dalam hal perencanaan atas dasar prinsip desentralisasi dan evaluasi berkelanjutan. Di samping itu, mengatur peran

negara/pemerintah yang secara konseptual dan praktikal tidak lagi menjadi lembaga sentral yang menetapkan ketentuan dan mengontrol perguruan tinggi secara rinci, tetapi lebih sebagai pemberi insentif agar sumber daya manusia serta keuangan dialokasikan kepada prioritas terpenting dan pendorong untuk meningkatkan standar kualitasnya.

Berkenaan dengan reformasi pendidikan, dilakukan secara menyeluruh terhadap semua aspek pendidikan: filosofi dan kebijakan pendidikan, sistem pendidikan berbasis masyarakat (*community based education*), pemberdayaan tenaga pengajar/tenaga kependidikan, sistem manajemen berbasis sekolah (*school based management*), implementasi paradigma baru, sistem pembiayaan pendidikan. Dalam hubungan ini, direkomendasikan perlunya mengadopsi dua strategi: *defensive strategy* dan *recovery strategy*, dengan inti tujuannya mempertahankan prestasi yang telah dicapai pada masa lalu dan sekaligus berupaya meningkatkan segala sesuatu yang dinilai baik.

Selanjutnya, dalam paradigma ini misi dan fungsi perguruan tinggi dirumuskan secara spesifik:

Pertama, mendidik mahasiswa dan warga negara untuk memenuhi keperluan semua sektor aktivitas manusia dengan penawaran kualifikasi yang relevan, termasuk pendidikan dan pelatihan profesional yang mengkombinasi ilmu pengetahuan dan keahlian tingkat tinggi melalui matakuliah yang terus dirancang serta dievaluasi secara kontinu, dan terus dikembangkan untuk menjawab berbagai tuntutan masyarakat dewasa ini dan masa datang,

Kedua, memberikan kesempatan kepada para peminat untuk memperoleh pendidikan sepanjang hayat, memberikan sejumlah pilihan yang optimal dan fleksibel untuk masuk dan keluar ke dan dari sistem yang ada, memberikan kesempatan bagi pengembangan individu dan mobilitas sosial agar berpartisipasi aktif dalam masyarakat dengan memiliki visi yang mendunia dan kapasitas membangun yang mempribumi.

Ketiga, memajukan dan menyebarkan ilmu pengetahuan melalui penelitian serta memberikan keahlian (*expertise*) yang relevan untuk membantu masyarakat dalam pengembangan sosial, ekonomi, budaya dan pengembangan penelitian sains, teknologi, ilmu sosial, humaniora, seni kreatif.

Keempat, membantu untuk memahami, menafsirkan, memelihara, memperkuat, mengembangkan, serta menyebarkan budaya historis nasional, regional, internasional dalam pluralisme dan keragaman budaya,

Kelima, membantu untuk melindungi dan memperkuat nilai-nilai sosial dengan menanamkan kepada generasi muda nilai-nilai yang membentuk dasar kewarganegaraan yang demokratis (*democratic citizenship*).

Keenam, memberikan kontribusi bagi pengembangan dan peningkatan pendidikan di setiap jenjang, termasuk pelatihan tenaga pengajar.

Mengenai konsep pengembangan perguruan tinggi, paradigma yang dirintis bertumpu pada tiga pilar utama, yang saling berkaitan dan harus diaktualisasikan secara simultan, yakni:

1. *Greater autonomy*, kemandirian lebih besar dalam pengelolaan atau "otonomi lebih luas" bukan saja dalam hal pengelolaan manajerial, tetapi juga dalam penentuan/pemilihan kurikulum dalam upaya penyesuaian dengan dunia atau pasar kerja. Perguruan tinggi tidak saja berfungsi meningkatkan kualitas SDM dengan penguasaan sains dan teknologi, ilmu-ilmu sosial dan humaniora, tetapi harus mengembangkannya melalui penelitian dan pengembangan (*research and development*).
2. *Greater accountability*, akuntabilitas yang bukan hanya terkait dengan pemerintah sebagai pembina pendidikan dan pemberi sumber dana/sumber daya, tetapi juga dengan dunia profesi dan masyarakat luas. Bukan hanya bertanggungjawab dalam pemanfaatan sumber-sumber keuangan, tetapi juga dalam pengembangan keilmuan, kandungan pendidikan, dan program yang dilaksanakan.

3. *Greater quality assurance*, jaminan bagi kualitas melalui evaluasi internal (*internal evaluation*) yang berkesinambungan dan evaluasi eksternal (*external evaluation*) yang dilakukan oleh BAN-PT, agar perguruan tinggi dapat lebih meningkatkan fungsinya dengan menentukan standar yang lebih fleksibel demi kemungkinannya melakukan perubahan dan penyesuaian terhadap tuntutan dunia kerja.

Khusus pada perguruan tinggi Islam, rintisan paradigma ini memperoleh landasan pijak yang kukuh karena perkembangan studi Islam dewasa ini memperlihatkan gejala baru yang ditandai sebagai berikut:

1. Beragam pendekatan dilakukan dalam memahami keislaman (penggabungan pendekatan normatif dan analisis sosio-historis), berdampak positif bagi perluasan topik kajian dan kedalaman analisis. Kajian masalah kontemporer yang dipadukan dengan basis teks klasik menjadi kecenderungan utama kajian di IAIN/UIN dan STAIN khususnya.
2. Berkembang pengenalan terhadap berbagai pandangan dan argumen yang berdampak pada pemahaman yang plural *polyphonic understanding* bagi kekayaan dan keragaman tradisi intelektual Islam. Pemahaman plural ini berakibat pula munculnya *an Islam based on tolerance and inclusiveness* di Indonesia.
3. IAIN/UIN dan STAIN memantapkan diri menjadi institusi akademik (tanpa mengesampingkan peran dakwah) dengan upaya melakukan kajian keagamaan yang berbasis penelitian akademis. Program studi yang dikembangkan tidak saja mengenai kajian ilmu-ilmu keislaman, tetapi juga ilmu-ilmu yang erat kaitannya dengan masalah sosial dan keagamaan.
4. IAIN/UIN dan STAIN mejadi *center of excellence* bagi pendidikan dan penelitian Islam di Indonesia dengan mengembangkan *local context* dan

local content dari Islam di Indonesia. Dalam hal ini, ia menjadi pusat bagi pengembangan Islam kultural yang berakar di Indonesia.

Penutup

Perlu disadari bahwa jumlah masyarakat muslim yang mayoritas di Indonesia belum menjamin bahwa upaya pengembangan pendidikan tinggi (terutama perguruan tinggi Islam) tanpa kendala sama sekali. Jika tidak ingin dikatakan "mayoritas dalam jumlah., minoritas dalam kualitas pendidikan", sudah saatnya berupaya memanfaatkan potensi mayoritas tersebut secara lebih bermakna, sehingga dapat berperan lebih penting dalam meletakkan dasar dan memberi arah terhadap strategi pengembangan pendidikan tinggi dalam era pembangunan nasional dan era reformasi yang sedang berlangsung serta era global di masa depan.

Catatan

¹ S.S. Husain and S.A. Ashraf, *Crisis in Muslim Education* (Jeddah: King Abdul Aziz University, 2003), p.36.

² M.Amien Rais, Yahya A.Muhaimin, in: Sharom Ahmat and Sharon Siddique, *Muslim Society, Higher Education and Development in Southeast Asia* (Singapore; Institute of Southeast Asia Studies, 2002), p.13 and 32; bandingkan dengan: Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900 - 1942* (Jakarta: LP3ES, 2012), h. 69-95.

³ *Ibid*, p. 41 and 32.

⁴ Chalidjah Hasanuddin, *Al-Jam'iyatul Washliyah: Api Dalam Sekam* (Bandung: Pustaka, 2008), h.17-19.

⁵ Lihat: Koentjaraningrat and Harsya W.Bachtiar, "Higher Education in the Sosial Science in Indonesia", in: Koentjaraningrat (ed), *The Social Sciences in Indonesia* (Jakarta : LIPI, 2005), p.48.

⁶ Lihat: *Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Soeharto* (Jakarta: Departemen Penerangan RI, 1984), h. 927.

⁷ Lihat: Doddy T. Amidjaja and Sapi'ie, *Higher Education in Indonesia: From Random Growth towards a National System* (Jakarta: mimeographed, 2007).

⁸ Lihat: Wolfgang Karcher, *Higher Education in Indonesia: Challenges and Perspectives* (Berlin: mimeographed, 2001).

⁹ Shafruddin Hashim, in: Sharom Ahmat and Sharon Siddique, *Muslim Society, Higher Education and Development in Southeast Asia*, (Singapore: Institute of Southeast Asia Studies, 2002), p. 48.

¹⁰ .Amien Rais, in: Sharom Ahmat, *Muslim Society*, p. 22.

¹¹ Soedjatmoko, *Manusia dan Pergolakan Dunia : Tantangan Terhadap Universitas* (Jakarta: Kelompok Kompas Gramedia, 2009), h. 11.

¹² Hafid Abbas, "Reformasi Pendidikan Agama Islam di PTU: Visi, Misi, dan Strategi" dalam: Fuaduddin & Cik Hasan Bisri(ed), *Dinamika Pemikiran Islam di Perguruan Tinggi, Wacana Tentang Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2009), h. 110.

¹³ Azyumardi Azra, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional, Rekonstruksi dan Demokratisasi* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2012), h. 23-24.

Bibliografi

Ahmat, Sharom and Siddique, Sharon. *Muslim Society, Higher Education and Development in Southeast Asia*. Singapore; Institute of Southeast Asia Studies, 2002.

Amidjaja, Doddy T. and Sapi'ie. *Higher Education in Indonesia: From Random Growth towards a National System*. Jakarta: mimeographed, 2007

Azra, Azyumardi. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional, Rekonstruksi dan Demokratisasi*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2012.

Departemen Penerangan RI. *Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Soeharto*. Jakarta: Departemen Penerangan RI, 1984.

Fuaduddin & Bisri, Cik Hasan (ed.). *Dinamika Pemikiran Islam di Perguruan Tinggi, Wacana Tentang Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2009.

Hasanuddin, Chalidjah. *Al-Jam'iyatul Washliyah: Api Dalam Sekam*. Bandung: Pustaka, 2008.

Husain, S.S. and Ashraf, S.A. *Crisis in Muslim Education*. Jeddah: King Abdul Aziz University, 2003.

Jabali, Fuad dan Jamhari. *IAIN, Modernisasi Islam di Indonesia*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2012.

Karcher, Wolfgang. *Higher Education in Indonesia: Challenges and Perspectives*. Berlin: mimeographed, 2001.

Koentjaraningrat (ed.), *The Social Sciences in Indonesia*. Jakarta: LIPI, 2005.

Noer, Deliar. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900 – 1942*. Jakarta: LP3ES, 2012.

Soedjatmoko, *Manusia dan Pergolakan Dunia: Tantangan Terhadap Universitas*. Jakarta: Kelompok Kompas Gramedia, 2009.

Suhendro, Bambang. *Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang 1996-2005*. Jakarta: Dirjen Dikti, 1996.